



GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA

**TAK HARUS MENUMPUK:** Pekerja mengangkut sampah yang sudah menumpuk sehari-hari di salah satu sudut Pasar Beringharjo sisi timur, Kota Jogja, kemarin (6/5).

## DLHK Fokus Penataan TPST Piyungan

**SUDAH** sepekan pengelolaan sampah secara desentralisasi berjalan di Kota Jogja, Sleman, dan Bantul (Kartamantul). Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIJ saat ini tengah fokus melakukan penataan di lokasi TPST Piyungan ■ *Baca DLHK... Hal 7*



# DLHK Fokus Penataan TPST Piyungan

Sambungan dari hal 1

Kepala DLHK DIJ Kusno Wibowo mengatakan, saat ini penataan masih dilakukan, khususnya menata di area zona transisi. Agar tidak timbul dampak-dampak lingkungan akibat dari penumpukan sampah di sana.

"Kami masih menata di zona transisi dan masih berlangsung. Artinya belum selesai. Bagaimana agar Piyungan aman ke depan," katanya kemarin (6/5).

Kusno menjelaskan, penataan yang dilakukan bukan pengepresan sampah, melainkan melansir sampah dari pinggir ditarik atau dimasukkan ke area dalam TPST. Penataan dilakukan menggunakan alat berat sekaligus untuk memadatkan. "Landfill-nya juga dilapisi tanah atasnya agar nggak bau. Baru sebatas itu penataan kami sepekan ini," ujarnya.

Penataan diperkirakan berlangsung dua hingga tiga bulan ke depan. Selain itu juga masih melakukan aktivitas penguatan dinding. "Ini agar kokoh dan tidak membahayakan masyarakat sekitar," jelasnya.

Kusno menyebut, hingga sekarang pihaknya belum menerima pengajuan pendampingan dari wilayah terkait kendala desentralisasi pengelolaan sampah yang telah dilakukan masing-masing kabupaten.

"Sampai sekarang belum ada surat dari kabupaten ke kami untuk semacam minta pendampingan atau yang lain. Hampir seminggu, berarti kabupaten/kota sudah bisa berjalan desentralisasi sampah," terangnya.

Disinggung soal tumpukan sampah di beberapa titik,

Kusno menyerahkan tanggung jawab ke kabupaten/kota. Sebab, TPST Piyungan pun telah tutup permanen alias tidak melayani pengangkutan lagi. Maka sampah yang berserakan dinilai harus segera diekskusi kabupaten/kota.

"Jadi tinggal teknis saja soal buka tutup depo di kabupaten/kota. Mungkin pada saat depo tutup, makanya jadi banyak tumpukan sampah," tambahnya.

Berkaitan pembukaan depo di Kota Jogja menjadi kewenangan Pemkot Jogja. Hanya memang selama enam bulan terakhir pihaknya belum diundang lagi untuk berkoordinasi lebih lanjut. "Mungkin pekan ini kami undang lagi untuk koordinasi lebih lanjut," tambahnya.

Instansi ini juga akan melakukan kajian setelah penataan rampung. Kajian akan melibatkan pihak ketiga untuk membicarakan rencana peralihan TPST Piyungan ke depan.

"Semoga bisa disepakati (pengajuan kajian) karena butuh biaya. Tapi kalau di pertengahan 2024 belum bisa ada kajiannya, ke-

mungkinan di 2025. Tapi pasti kami tata, apakah dimanfaatkan untuk edukasi dan lain-lain, nanti tergantung dari hasil kajian," tandasnya.

Seorang warga Kota Jogja Yuli merasakan kesulitan untuk membuang sampah saat ini. Biasanya membuang sampah di TPS Brigjen Katamsob sebelum kebijakan desentralisasi berjalan penuh. Namun saat awal Mei TPS itu tidak membuka layanan atau tutup. Sehingga sampah di rumah pun menumpuk.

"Pembuangan sampah terakhir 30 April. Setelah itu belum buang sampah lagi. Sebelum itu, kalau buang sampah bisanya pagi sekitar 06.30, biasanya kalau lebih dari pukul 07.00 truknya udah penuh jadi enggak bisa," kata warga Mantrijeron ini.

Dia menyebut, setelah sepekan kebijakan berjalan penuh dia tak mendapat informasi pasti untuk membuang sampah. Hanya selama ini dia melihat Instagram Pemkot Jogja terkait jadwal kapan tempat pembuangan sampah di kota dibuka. (wia/laz/hep)



**TIMBULKAN BAU:** Pekerja mengangkut sampah yang sudah menumpuk sehari-hari di salah satu sudut Pasar Beringharjo sisi timur, Kota Jogja, kemarin (6/5).

GANTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005